

## **BAB II**

### **STUDI PUSTAKA**

#### **2.1. Deskripsi Konseptual**

##### **2.1.1. Defenisi Usaha Mikro Menengah**

Terdapat beberapa definisi mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut definisi mengenai UMKM menurut beberapa instansi: Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi dan UMKM dalam AUFAR (2014:8) :

Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha

yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam AUFAR (2014:9) :

Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 600.000.000).

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

### **2.1.2. Kriteria dan Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Dengan banyaknya definisi yang menjelaskan tentang pengertian UMKM maka menimbulkan banyaknya perbedaan persepsi dalam hal pengelompokan atau penggolongan UMKM. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini yang digunakan adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 sebagai dasar untuk penggolongan UMKM berdasarkan kriteria yang ada sebagai berikut:

Kriteria dan ciri-ciri Usaha Mikro:

“Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Memiliki jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 4 orang. Ciri-ciri usaha mikro diantaranya sebagai berikut: Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP”

Kriteria dan ciri-ciri Usaha Kecil:

“Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah). Memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang.

Ciri-ciri usaha kecil diantaranya sebagai berikut:

“Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah; Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah; Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha; Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP; Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha; Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal”

Kriteria dan ciri-ciri Usaha Menengah:

“Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 9 puluh milyar rupiah). Memiliki jumlah tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Ciri-ciri usaha menengah adalah sebagai berikut: Pada umumnya telah memiliki manajemen

dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi; Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk audit dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan; Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan; Telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dll; Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dll; dan Sudah memiliki akses kepada sumber sumber pendanaan perbankan”.

### **2.1.3. Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir (2017:7) “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Laporan keuangan menurut Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim (2016:49), yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, kualitas manajemen dan lainnya. Sedangkan menurut Lubis (2017:13) “laporan keuangan adalah hasil akhir dari pencatatan yang

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan". Menurut Kasmir (2017:28-30), dalam praktiknya secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

Neraca (*Balance Sheet*) Merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) Merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan Arus Kas Merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan Catatan atas Laporan keuangan Merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dahulu sehingga jelas.

#### **2.1.4. Tujuan Laporan Keuangan**

Dalam menjalankan sebuah bisnis, perusahaan jasa juga membutuhkan laporan keuangan. Tentunya laporan keuangan di perusahaan jasa memiliki fungsi dan tujuan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan perusahaan jasa bisa digunakan untuk mengidentifikasi dengan jelas dan lengkap tentang segala hal tentang informasi keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Ada beberapa tujuan dari pembuatan laporan

keuangan perusahaan jasa,

yaitu diantaranya adalah :

1. Menyajikan semua informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan.
2. Sebagai kebutuhan atas informasi bersama.
3. Untuk mengukur apa yang telah dicapai oleh jajaran manajemen.
4. Menjadi acuan utama investor, promotor, atau kreditor untuk menilai kelayakan suatu perusahaan dalam mendapat bantuan dana.

Dilihat dari sisi pemegang saham, bagi mereka laporan keuangan perusahaan bisa membantu untuk mempelajari dan mengetahui aspek-aspek yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Tujuan laporan keuangan menurut Hans (2016:16) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Menurut Hutaeruk (2017:10) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

### 2.1.5. Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki beberapa keterbatasan bagi para penyusun maupun pengguna laporan keuangan. Berikut beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dikemukakan oleh para ahli: Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:29) Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan mempunyai beberapa keterbatasan:

1. Laporan keuangan semata-mata merupakan potret atau rekaman sejarah yaitu tentang keadaan dan peristiwa masa lalu, dan tidak dapat digunakan sebagai bola kaca untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang.
2. bila tidak dilengkapi data dan informasi lain yang diperlukan untuk membuat analisis proyeksi masa depan.
3. Akuntansi melakukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan dengan menggunakan satuan uang sebagai denominator atau alat ukur. Namun tidak semua hal dapat diukur dengan nilai uang dan nilai uang juga cenderung tidak stabil.
4. Konsep dasar akuntansi keuangan ada kalanya tidak sejalan atau bertentangan dengan aspek hukum, misalnya konsep “makna lebih penting dari bentuk” (*substance over form*).
5. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yang dalam berbagai standar memperbolehkan beberapa alternatif metode akuntansi, yang menyebabkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda, tidak selalu dapat diperbandingkan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan memiliki beberapa keterbatasan seperti laporan keuangan disajikan berkala dan tidak aktual menyajikan peristiwa masa lalu yang tidak bisa meramalkan untuk kedepannya, laporan keuangan disusun berdasarkan biaya historis dan konservatisme yang lambat untuk diakui, terkadang laporan keuangan yang disusun bertentangan dengan hukum yang berlaku meskipun telah menggunakan standar akuntansi yang telah ditentukan, dan tidak semua hal dapat diukur dengan satuan uang yang dilaporkan pada laporan keuangan. Maka perlu adanya analisis laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan.

## **2.2. Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP**

### **2.2.1. Pengertian SAK ETAP**

Menurut Agus Arwani (2016:263) SAK ETAP adalah sebagai berikut: Standar Akuntansi Tanpa Entitas Publik, standar ini akan membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal dengan tanpa terjebak dalam kerumitan standar akuntansi berbasis IFRS. SAK ETAP ini akan di khusus digunakan untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Sedangkan menurut Syaiful Bahri (2016:9), SAK ETAP muncul sebagai solusi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. ETAP adalah tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Berdasarkan pernyataan-

pernyataan atau teori-teori diatas dapat dikatakan bahwa SAK ETAP adalah sebuah standar untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dalam menyediakan laporan keuangan yang tetap relevan dan andal.

### **2.2.2. Ruang Lingkup SAK ETAP**

Menurut SAK ETAP (2017,1) Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Entitas Tanpa Akuntabilitas publik adalah entitas yang :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan *umum (general purpose financial statement)* bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk kelompok besar masyarakat. Seperti; bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dan pensiun, reksa dan dan bank investasi.
3. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

### **2.2.3. Fungsi SAK ETAP**

SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memilikiprinsip going concern yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Fungsi SAK ETAP Menurut Nurkamsiah (2016: 155) SAK ETAP penting diperhatikan bagi pihak UKM agar pengelolaan bisnis lebih efektif, efisien, dan akurat. Dengan diterapkannya SAK ETAP oleh UKM, maka UKM tentu akan memiliki data (keuangan) akurat yang amat berguna bagi pelaku UKM dalam upaya lebih meningkatkan produktivitas,efektivitas, dan efisiensi.

### **2.2.4. Penerapan Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP**

Tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyusun standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif 1 Januari 2011. (SAK ETAP, 2017:9) Menurut SAK ETAP (2017,12) Laporan keuangan Entitas meliputi:

## 1. Neraca

Menurut Kasmir (2016:28) Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

**Tabel 2.1**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**Per 31 Desember 20xx**

<b>AKTIVA</b>		Kewajiban dan Ekuitas	
<b><u>AKTIVA LANCAR</u></b>	xxx	<b><u>Kewajiban Lancar</u></b>	
Kas setara	xxx	Hutang usaha	xxx
Piutang usaha	xxx	Hutang lain-lain	xxx
Piutang lain-lain	xxx	Hutang pajak	xxx
Persediaan	<u>xxx</u>		
Pajak dibayar dimuka	<u>xxx</u>	<b><u>Jumlah Kewajiban</u></b>	xxx
Jumlah aktiva lancar	xxx	<b><u>Lancar</u></b>	
			xxx
<b><u>Aktiva Tetap</u></b>		<b><u>Ekuitas</u></b>	xxx
Harga perolehan	xxx	Modal/Laba/(rugi)	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	berjalan	xxx
Aktiva bersih	xxx	Jumlah ekuitas	xxx
<b>Total Aktiva</b>	xxx	Total kewajiban dan Ekuitas	xxx

Sumber : SAK ETAP

## 2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi

dalam periode terjadinya perubahan (IAI, 2017, 19).

**Tabel 2.2**  
**Laporan Laba Rugi**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20xx**

Allbaik Chicken Laporan Laba Rugi Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20xx		
Penjualan HPP Laba (Rugi) Kotor	xxx xxx	Rp (xxx)
Beban Administrasi: Beban Utilitas Beban Penyusutan Beban Pemeliharaan Beban Pajak Total Beban Administrasi	xxx xxx	
Beban penjualan : Beban gaji Beban Iklan Beban pengiriman	xxx xxx xxx	xxx
Total beban penjualan	xxx	
Total beban Laba operasi	xxx xxx	xxx
Pendapatan lain Beban lain – lain	xxx xxx	
Laba bersih sebelum pajak	xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	xxx	xxx
Laba (rugi) bersih	xxx	xxx
		xxx

*Sumber : IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) 2009*

### 3. Laporan Perubahan Ekuitas

Tujuan laporan perubahan ekuitas menurut IAI (2017, 21) Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut,

dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. Menurut SAK ETAP (2017,21) Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas menunjukkan :

1. Laba rugi untuk periode.
2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.
3. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham *treasury*, dan dividen serta distribusi lainnya pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.
4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama periode dari aktivitas operasi investasi dan pendanaan. SAK ETAP (2017, 23). Informasi yang disajikan didalam laporan arus kas menurut SAK ETAP (2017,23)yaitu sebagai berikut :

- a. Aktivitas Operasi
- b. Aktivitas Investasi
- c. Aktivitas Pendanaan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan (IAI, 2009a: 8.1) Menurut SAK ETAP (2017,27) Catatan atas laporan harus :

- (a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu.
- (b) Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- (c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

#### **2.2.5. Prinsip-Prinsip Dasar SAK ETAP**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016:8) persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif (pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas) dari Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan. Menurut IAI (2016:29) jika SAK ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen harus menggunakan pertimbangannya (*judgement*) untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:

- (a) Relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan

ekonomi, dan

- (b) Andal yaitu dalam laporan keuangan yang;
- (c) Menyajikan dengan jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas.
- (d) Mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya, serta tidak hanya mencerminkan bentuk hukumnya.
- (e) Netral yaitu bebas dari bias.
- (f) Mencerminkan kehati-hatian.
- (g) Bersifat lengkap dalam suatu hal yang material.

#### **2.2.6. Perbedaan SAK UMUM dan SAK ETAP**

SAK ETAP (Entitas tanpa akuntabilitas publik) adalah sistem akuntansi keuangan yang diterapkan dalam perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Mudahnya adalah laporan keuangan tidak ditujukan untuk pengguna eksternal. Sementara PSAK umum ditujukan pada entitas dengan akuntabilitas publik signifikan. Dimana mereka terdaftar pada otoritas pasar modal atau entitas ini menguasai aset untuk kelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pedagang efek. Tabel 2.3

**Tabel 2.3**  
**Perbedaan SAK UMUM dan SAK ETAP**

	SAK UMUM	SAK ETAP
Penyajian Laporan Keuangan	Penyajian laporan keuangan mengikuti IFRS dengan perubahan antara lain; 1.tidak ada lagi pos luar biasa pada neraca 2.laba rugi komprehensif 3.cash flow metode langsung (dianjurkan), dan tidak langsung.	Minimum pos yang ada di neraca lebih sedikit. 1.silent terhadap pos luar biasa 2.laporan laba rugi (tanpa harus menyajikan laba rugi komprehensif) 3.cash flow dengan metode tidak langsung.
Aset tetap dan properti investasi	1.memberikan pilihan metode biaya atau revaluasi untuk aset tetap 2.metode fair value untuk properti investasi.	1.aset tetap, properti investasi menggunakan metode biaya kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model revaluasi diterapkan

Sumber: SAK ETAP

### 2.3. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai landasan penulis dalam penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu juga dijadikan referensi oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini.

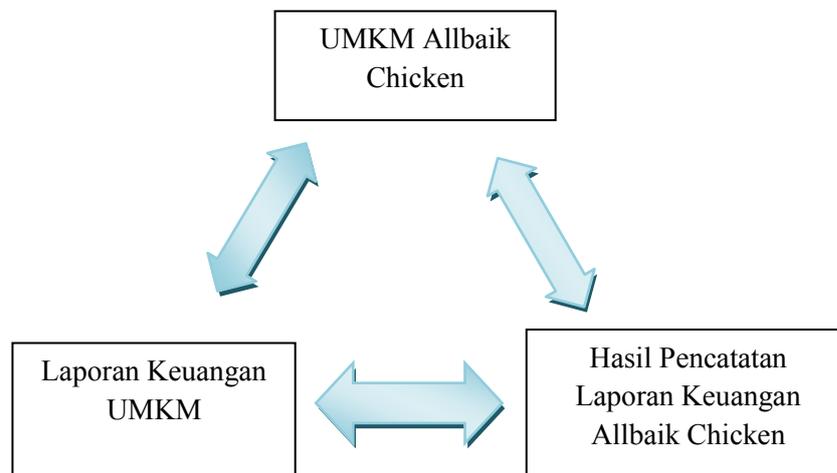
**Tabel 2.4**  
**Hasil Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	PristianaWidyastuti(2017)	Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa	Menemukan bahwa Disco belum menerapkan pencatatan lapora keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana yaitu menuliskan pendapatan dari hasil pembayaran uang jasa bimbingan belajar oleh siswa dan pengeluaran berupa beban dan biaya-biaya pada buku besar yang ditulis secara manual.

2	Dewi Anggraini dan Andra AgtuAlfrian (2019)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Rumah Lele “RULE” Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas	Menemukan bahwa dalam teori, laporan keuangan menurut SAK ETAP terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan di Rumah Lele “RULE” masih dibuat secara sederhana dan belum mengacu terhadap SAK ETAP.
3	Abdul Muchid(2015)	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Kasus pada UD. Mebel Novel di Banyuwangi).	Menemukan bahwa penyusunan laporan keuangan UD. Mebel Novel mulai 31 desember 2014 menggunakan SAK- ETAP sebagai dasar penyusunan yang digunakan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam setiap instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan UD. Mebel Novel.

#### 2.4. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.4**  
**Kerangka Berpikir**